

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Bagir Manan. 2000. Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. *Makalah Seminar nasional "Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruan 13 Mei 2000*. Bandung: UNPAD
- ChandraKusuma Putra dkk. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Vol. 1*
- Desleani, Andaria. 2011. *Pengembangan Masyarakat Desa Melalui Dana Desa*. Jakarta: Gramedia.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Putra, Chandra Kusuma dkk. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No 6*.
- Rony, Hanitijo Soemitro. 2008. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ronny, Hanitijo. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal 57-58
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- Sujiono.P. 2006. *Manajemen Pelayanan Publik*. Cendekia. Jakarta.
- Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development*

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

INTERNET

Pertumbuhan Ekonomi tak Merata, Pengamat: Akibat Ketimpangan Infrastruktur diakses dari
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/05/07/nnny3e7-pertumbuhan-ekonomi-tak-merata-pengamatakitab-ketimpangan-infrastruktur> p

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI. Artikel ilmiah: Dana Desa: Alokasi Dan Potensi Inefektivitasnya. Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permendesa No. 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa tujuan dari Alokasi Dana Desa